

EFISIENSI DAN KEADILAN BIAYA PRODUKSI SYARIAH: STUDI KASUS PADA INDUSTRI MAKANAN HALAL DI INDONESIA

Edy Setiawan

¹ Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

Email : edysetiawan@unikarta.ac.id

Abstract :

This study examines the efficiency and fairness of sharia-based production cost in the halal food industry in Indonesia through a literature review. Efficiency in the Sharia context goes beyond optimal cost management by prioritizing principles of justice, transparency, and social responsibility in accordance with Islamic values. Fairness in production cost is assessed through equitable treatment of workers, proportional profit sharing, and protection of consumers and the environment. This study employs a descriptive qualitative method by collecting and analyzing various literature sources related to the concepts of efficiency and justice in Islamic economics, as well as the dynamics of Indonesia's halal food industry. The analysis results indicate that efficient and fair management of halal production contributes to enhancing the competitiveness and sustainability of Indonesia's national halal industry. Main challenges such as certification cost, limited human resources, and access to Sharia financing become focal points for developing the sector. In conclusion, comprehensive implementation of Sharia economic principles can strengthen the integrity and sustainability of Indonesia's halal food industry.

Keywords : *Sharia production efficiency, fairness in production costs, halal food industry, Islamic economics, Indonesia.*

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji efisiensi dan keadilan biaya produksi syariah pada industri makanan halal di Indonesia melalui studi literatur. Efisiensi dalam konteks syariah tidak sekedar pengelolaan biaya yang optimal, tetapi juga mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sesuai nilai-nilai Islam. Keadilan biaya produksi dinilai dari perlakuan adil kepada pekerja, pembagian keuntungan yang proporsional, serta perlindungan konsumen dan lingkungan. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber pustaka terkait konsep efisiensi dan keadilan ekonomi syariah serta dinamika industri makanan halal di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan produksi halal yang efisien dan adil berkontribusi pada peningkatan daya saing dan berkelanjutan industri halal nasional. Tantangan utama seperti biaya sertifikasi, keterbatasan SDM, dan akses pembiayaan syariah menjadi fokus solusi untuk pengembangan sektor ini. Kesimpulannya, penerapan prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh dapat memperkuat integritas dan keberlanjutan industri makanan halal di Indonesia.

Kata Kunci: *Efisiensi produksi syariah, keadilan biaya produksi, industri makanan halal, ekonomi syariah, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Industri makanan halal di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya kehalalan produk sesuai syariat Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global yang tidak hanya menonjol dari segi kualitas produk, tetapi juga nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan etika dalam proses produksi. Dalam konteks ini, efisiensi biaya produksi berbasis syariah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar pelaku industri tidak hanya dapat meningkatkan daya saing, melainkan juga mewujudkan keadilan distributive dan transparansi dalam pengelolaan produksi (Subarkah, et.al., 2024; Munthe, et.al., 2023).

Konsep biaya dan efisiensi produksi dalam kerangka ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan ekonomi konvensional, terutama dalam hal filosofi dan nilai-nilai yang diusung. Dalam ekonomi Islam, biaya tidak hanya dilihat dari segi pengeluaran, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang mengajarkan praktik-praktik yang merugikan, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Efisiensi produksi dalam perspektif Islam menekankan pada penggunaan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek moral, sosial, dan keadilan ekonomi (Fauzia, 2023).

Biaya produksi dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya soal pengeluaran moneter, tetapi juga harus diimbangi dengan prinsip keadilan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja, konsumen, dan lingkungan (Wiby Qurnia Dewi, et.al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji efisiensi dan keadilan biaya produksi syariah di industri makanan halal di Indonesia melalui studi literatur, guna memberikan gambaran komprehensif terkait praktek, tantangan, dan kontribusi nilai-nilai syariah pada pengelolaan produksi halal yang beretika dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip moral, sosial, dan keadilan ekonomi dalam efisiensi produksi menurut Islam mengharuskan proses produksi dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Konsep biaya dan efisiensi syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong investasi yang memberdayakan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial. Rekomendasi untuk implementasi efisiensi produksi berbasis Islam di sektor keseimbangan yang mencakup pengembangan skema pembiayaan syariah yang adil, program literasi keuangan syariah, pelatihan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi digital. Dengan menerapkan prinsip efisiensi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Implementasi ini diharapkan dapat memperkuat kohesi sosial, memperluas inklusi keuangan, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Ahmad Ghofur, 2017).

TINJAUAN LITERATUR

A. Konsep Efisiensi dan Biaya Produksi Dalam Ekonomi Syariah

Efisiensi produksi dalam ekonomi Islam diarahkan untuk memaksimalkan hasil dengan pengelolaan biaya yang adil tanpa mengabaikan nilai moral dan tanggungjawab sosial. Prinsip ini menolak praktek riba dan ketidakadilan dalam pembiayaan serta menuntut transparansi dan kejujuran dalam pencatatan biaya produksi (Wiby Qurnia Dewi, et.al., 2025). Studi oleh Subarkah, et.al. (2024) menggaris bawahi perlunya pendekatan holistik yang menyatukan aspek ekonomi, etika, sosial, dan spiritual agar produksi halal benar-benar berkelanjutan dan berkualitas.

B. Keadilan Dalam Biaya Produksi Syariah

Keadilan dalam pengelolaan biaya produksi syariah mencakup pemberian upah yang layak bagi pekerja, system bagi hasil yang adil antara pemilik modal dan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap konsumen melalui penggunaan bahan halal dan proses produksi *thayyib* (baik dan layak), (Munthe, et.al., 2023). Prinsip ini juga menyoroti pentingnya penghindaran eksploitasi dan monopoli agar tidak merugikan pihak manapun.

C. Industri Makanan Halal di Indonesia

Indonesia memiliki regulasi sertifikasi halal yang ketat melalui Lembaga seperti BPJPH dan MUI, yang menuntut konsistensi antara bahan, proses, alat, dan manajemen sesuai hukum Islam. Namun, tantangan implementasi seperti biaya sertifikasi yang tinggi, keterbatasan SDM, dan kurangnya literasi halal tetap menjadi hambatan bagi UMKM makanan halal (Anas Malik, et.al., 2025). Penguatan ekosistem halal, termasuk pembiayaan syariah yang adil, dapat memperluas akses modal dan memperkuat daya saing industri halal (Ramadhani, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas efisiensi biaya produksi, keadilan ekonomi syariah, serta perkembangan industri makanan halal di Indonesia. Analisis ini dilakukan melalui sintesis dan interpretasi kritis dari berbagai sumber untuk merumuskan kerangka konseptual dan temuan-temuan utama terkait efisiensi dan keadilan biaya produksi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efisiensi Produksi Berdasarkan Prinsip Syariah

Analisis literatur menunjukkan bahwa efisiensi dalam produksi halal tidak hanya ditentukan oleh pengurangan biaya, tetapi juga oleh penerapan prinsip syariah yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Efisiensi ini menuntut optimalisasi sumber daya tanpa merugikan pihak lain, termasuk lingkungan dan pekerja (Wiby Qurnia Dewi, et.al., 2025). Dengan manajemen biaya yang transparan dan penggunaan pembiayaan syariah (*mudharabah* dan *musyarakah*), pelaku usaha dapat mengurangi resiko beban bunga dan meningkatkan kolaborasi strategis (Sudarmi, et.al., 2025). Efisiensi ekonomi termasuk dalam salah satu kunci penting dalam kegiatan perekonomian karena prinsipnya dapat menghasilkan produk dengan biaya

yang minim, kualitas yang bagus, serta keuntungan yang maksimal. Dalam hal ini dapat membuat pasar penjualan semakin meluas sehingga berdampak positif untuk masyarakat. Dengan menerapkan prinsip efisiensi membuat harga jual semakin murah sehingga meningkatkan daya beli konsumen dan dapat memperluas peluang kesempatan kerja untuk masyarakat. Tetapi, efisiensi yang tidak dibersamai dengan kebijakan yang tepat dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial, moral masyarakat, dan lingkungan sekitar. Banyaknya oknum pelaku usaha yang hanya mengedepankan keuntungan maksimal tanpa memperhatikan moral dan etika sehingga banyak terjadi penggunaan bahan berkualitas buruk dan membahayakan kesehatan masyarakat. Disamping isu moral yang terjadi, efisiensi juga berimplikasi terhadap aspek sosial. Pola pikir *profit oriented* menyebabkan persaingan ekonomi tanpa batas yang bisa mengarah pada persaingan yang tidak sehat dan konflik antar pelaku usaha. Hal ini dapat mengganggu keharmonisan dan keamanan sosial di suatu wilayah. Oleh sebab itu, efisiensi harus selalu sejalan dengan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku di Masyarakat (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2015).

B. Keadilan Biaya Produksi dan Dampaknya

Keadilan dalam pengelolaan biaya produksi termasuk perlakuan adil kepada pekerja, pembayaran upah layak, dan pembagian keuntungan yang proporsional. Hal ini juga menciptakan suasana usaha yang harmonis dan menumbuhkan kepercayaan konsumen pada produk halal (Munthe, et.al., 2023). Keadilan juga menjamin transparansi dalam harga produk, sehingga mencegah praktek monopoli dan penipuan yang dapat merugikan pasar dan Masyarakat luas.

C. Tantangan Industri Makanan Halal di Indonesia

Meski potensi besar, industri makanan halal di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala seperti biaya sertifikasi halal yang relatif tinggi, keterbatasan SDM kompeten, dan kurangnya pengetahuan konsumen tentang standar halal. Dukungan kebijakan pemerintah berupa subsidi biaya sertifikasi dan digitalisasi proses menjadi krusial untuk mendorong pertumbuhan UMKM halal secara adil dan efisien (Anas Malik, et.al., 2025). Selain itu, pembiayaan syariah yang mudah diakses dapat menjadi Solusi pembiayaan yang tidak memberatkan pelaku UMKM (Sudarmi, et.al., 2025).

KESIMPULAN

Implementasi efisiensi dan keadilan biaya produksi dalam industri makanan halal di Indonesia harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang menekankan transparansi, keadilan distributif, dan etika bisnis. Studi literatur menunjukkan bahwa konsep efisiensi syariah berbeda dari efisiensi konvensional karena memasukkan aspek moral dan tanggung jawab sosial, serta menolak praktek riba dan eksploitasi. Keadilan biaya produksi tercermin dalam perlakuan adil kepada pekerja, penggunaan pembiayaan yang adil, dan perlindungan konsumen.

Konsep biaya dan efisiensi produksi dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari pendekatan konvensional karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, keberlanjutan, dan

tanggung jawab sosial. Biaya produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat sebagai pengeluaran finansial, tetapi juga harus bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Efisiensi produksi tidak hanya bertujuan memaksimalkan output dengan input minimal, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika Islam, serta membawa manfaat sosial yang adil dan merata.

Penguatan ekosistem halal melalui regulasi, pembiayaan syariah, dan pelatihan SDM mendukung pertumbuhan industri makanan halal yang berdaya saing dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan Lembaga keuangan syariah sangat penting untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan industri maanan halal yang efisien dan adil sesuai prinsip syariah.

SUMBER REFERENSI

- An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), 13-23.
- Fauzia, U. (2023). Efisiensi Ekonomi dalam Islam: Kajian terhadap QS. Al-Isra Ayat 26-29.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Malik, A., Romadhon, M.F., Putri, N.C., Pratama, R.A. (2025). Produksi Halal dan Standar Syariah dalam Industri. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1).
- Munthe. (2023). Prinsip Syariah dalam Meningkatkan Keadilan dan Efisiensi Produksi UMKM. *E-Journal Ekonomi Islam*.
- Qurnia, D.W., Putranta, N.C., Clarissa, M.A., Fadila, K.N., Hidayati, A.N. (2025). Analisis Konsep Biaya Dan Efisiensi Produksi Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Literatur Terhadap Prinsip Dan Implementasi. *Jurnal Inovasi Keuangan dan Manajemen*, 6(2), 63-73.
- Ramadhani, Z. (2021). *Sinergi Ekosistem Halal: Pemerintah, UMKM, dan Keuangan Syariah*. Pustaka Cendekia.
- Subarkah, D.P., Fauziyah, W., Albahi, M. (2024). Optimalisasi Produksi dalam Ekonomi Mikro Syariah: Studi Kasus pada Industri Halal. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24717>
- Sudarmi, Lutfi, M., Siradjuddin, Syam, A., Haruna, H. (2025). Membuka Gerbang Emas: Potensi Besar Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Industri Halal di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2).